Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 7, No. 2 Tahun 2024
DOI : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i2.27484

Dinamika Politik Islam di Eropa: Sejarah dan Realitas Politik Kontemporer

Endang Susanti
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
endangsusanti311@gmail.com

Aris Munandar
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
arism2365@gmail.com

Submitted: June 19th, 2024
Revised: December 25th, 2024
Accepted: February 05th, 2025

Abstract
The purpose of this article is to see the extent to which Islam plays a role in the world of politics in Europe. It is important to know that Islam is the second largest religion in Europe and of course its existence has a big influence on the running of government. This research uses analytical-descriptive methods based on library research. By referring to social identity theory, this research explores how religious identity can influence the political participation of Muslim communities amidst the social and cultural challenges they face. This research will focus more on the political conditions relating to Islam in Europe, especially in England, France, Germany and Sweden. The result is the fact that Islam plays an important role in these four countries, especially in terms of fulfilling minority rights such as freedom of religion and freedom of opinion. Islam is also involved in making government policies and ensuring that minorities receive equal protection. Even though they are faced with many challenges, the Muslim community continues to show active participation in politics, making them an important part of the development of democracy and diversity in Europe.
Keywords: Europe, Islamic Politics, Role, Muslims, Government

Abstrak
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana Islam berperan dalam dunia perpolitikan di Eropa. Penting diketahui bahwa Islam merupakan agama terbesar kedua di Eropa yang tentu keberadaannya sangat memberikan pengaruh dalam jalannya pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode analitis-deskriptif yang didasarkan

pada penelitian pustaka. Dengan mengacu pada teori identitas sosial, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana identitas keagaman dapat mempengaruhi partisipasi politik komunitas Muslim di tengah tantangan sosial dan budaya yang dihadapi. Penelitian ini akan lebih terfokus pada bagaimana kondisi perpolitikan yang berkenaan dengan Islam di Eropa khususnya di negara Inggris, Perancis, Jerman, dan Swedia. Dihasilkan fakta bahwa Islam memainkan peran penting di keempat negara tersebut terlebih dalam hal pemenuhan hak-hak minoritas seperti kebebasan beragama maupun kebebasan berpendapat. Islam juga terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan memastikan kaum minoritas memperoleh perlindungan yang sama. Meskipun dihadapakan dengan banyak tantangan, namun komunitas Muslim terus menunjukkan partisipasi aktif dalam politik sehingga menjadikan mereka sebagai bagian penting dari perkembangan demokrasi dan keberagaman di Eropa.
Kata kunci: Eropa, Politik Islam, Peran, umat Islam, Pemerintah

Pendahuluan

Islam masuk di Eropa dimulai pada abad ke 711 M di mana Semenanjung Andalusia atau Spanyol berhasil ditaklukkan oleh pasukan Thariq bin Ziyad (Suwito, 2005). Namun sebelum itu, umat Islam telah berhasil menaklukan Afrika Utara selama 53 tahun yakni dari pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan hingga masa pemerintahan al-Walid (Syalabi, 1983). Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ketika Musa bin Nushair dan Tharif bin Malik ikut bergabung dalam perjuangan Thariq bin Ziyad. Tak butuh waktu lama kota-kota penting seperti Granada, Cordova dan Toledo berhasil ditaklukkan umat Islam. Tak sampai di situ, kota-kota penting lainnya di Spanyol juga berhasil ditaklukkan (Usri & Hamzah S Fathani, 2022). Keberhasilan umat Islam dalam menaklukan daerah penting tersebut membuat umat Islam semakin kuat keberadaannya di Eropa.

Eropa di bagian utara berbatasan langsung dengan Samudra Artik, bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, bagian selatan mulai dari barat ke timur berbatasan dengan Laut Mediterania, Laut Hitam, Cekungan Kuma-Manych dan Laut Kaspia, sedangkan di bagian timur dari utara ke selatan berbatasan dengan Pegunungan Ural, Sungai Emba, dan berakhir di Laut Kaspia (Uddin et al., 2018). Selain itu, jumlah penduduk di Eropa saat ini mencapai 747.636.026 jiwa yang mana populasi pemeluk agama Islamnya 50.470.000 jiwa atau 6,81% dari total jumlah penduduk Eropa. Bahkan

diperkirakan di tahun 2025 penduduk Muslim di Eropa akan mencapai 90 juta atau 18% (Pew Research Center). Tentu dapat disimpulkan bahwa penduduk Muslim di Eropa akan semakin berkembang.

Agama dan politik memiliki hubungan yang kompleks dan rumit. Agama berfungsi sebagai kontrol manusia dalam melakukan kegiatan politik untuk membangun negeri sehingga keduanya memiliki timbal balik. Dalam berpolitik, praktik yang diterapkan juga berasal dari nilai-nilai yang diadaptasi dari agama. Karenanya dalam dunia politik, nilai-nilai agama sangat diperlukan sebagai kontrol para politisi agar tidak melampaui batasnya. Pada intinya negara membutuhkan agama untuk menjaga moral bangsa, begitu juga sebaliknya agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya (Budiyono, 2015).

Islam dan komunitas Muslim di negara-negara Barat menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Di samping perkembangannya yang cukup signifikan, keberadaan umat Islam juga memberi dampak terhadap kehidupan sosial politik di negara tersebut. Sebagai agama dengan populasi pemeluk yang cukup banyak, tentu umat Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kancah perpolitikan di Eropa. Keberadaan umat Islam memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap berjalannya pemerintahan di Eropa.

Dinamika politik Islam di Eropa mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mencerminkan interaksi antara komunitas Muslim dengan masyarakat luas. Keberadaan umat Islam di Eropa cukup signifikan hingga populasinya mencapai 25 juta orang dan diperkirakan akan mengalami perkembangan empat kali lipat di tahun 2050 atau setara dengan 25,8% dari total populasi (Ritonga dkk., 2024). Jumlah populasi yang kian banyak tersebut tersebut menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam perpolitikan di Eropa. Keberadaan umat Islam memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan keputusan pemerintah, terutama dalam isu-isu terkait integrasi, pendidikan, dan hak asasi manusia.

Politisi Muslim, baik yang berasal dari partai-partai mainstream maupun yang mendirikan partai berbasis agama berusaha mempresentasikan kepentingan komunitas

mereka. Mereka berusaha mendorong terciptanya dialog antaragama dan berupaya untuk mengatasi stereotip negatif yang sering melekat pada umat Islam. Selain itu, gerakan Islam di Eropa yang mencakup berbagai organisasi sosial dan politik berperan dalam mengadvokasi isu-isu seperti hak-hak sipil, pelestarian identitas budaya, dan perlindungan terhadap diskriminasi (Aliyudin, 2015).

Namun, komunitas Islam di Eropa juga menghadapi tantangan besar seperti Islamofobia dan diskriminasi. Isu-isu ini sering mempengaruhi partisipasi politik umat Islam dan menciptakan ketegangan antara komunitas Muslim dengan masyarakat non-Muslim. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dianggap diskriminatif, seperti larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang menjadi pemicu protes dan gerakan sosial di kalangan umat Islam. Secara keseluruhan, dinamika politik Islam di Eropa menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam, kebijakan publik, dan realitas sosial dapat saling berinteraksi. Hal ini menciptakan lanskap politik yang terus berkembang, di mana komunitas Muslim berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dalam bermasyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai dinamika politik Islam di Eropa yang membahas tentang sejarah dan peran Islam dalam perpolitikan telah dilakukan, namun kebanyakan hanya berfokus pada satu atau dua negara saja. Seperti halnya yang diteliti oleh Muflih Fahmi Kaunian dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Islam Politik di Eropa (Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam di Inggris dan Perancis Abad 20)" yang dipublis pada Jurnal Revolusi Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020. Dalam penelitiannya tersebut Muflih menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim di Eropa masih menghadapi tantangan berupa Islamophobia dan ketidaksetaraan meskipun nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan di negara Inggris dan Prancis sudah ditekankan (Kaunain, 2020).

Penelitian lainnya yang sejenis juga dilakukan oleh Moddie Alvianto Wicaksono dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy" yang dipublikasi pada Jurnal Transformasi Global Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017. Dalam penelitiannya tersebut

Moddie menyimpulkan bahwa imigran Muslim di Perancis semakin banyak dan menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Perancis. Akibatnya, pemerintahan Sarkozy mencoba mengatasi hal tersebut dengan pembuatan *French Immigration and Integration Law,* yang bertujuan untuk membatasi akses imigran Muslim di ruang publik. Hal tersebut membuat segregasi antara imigran Muslim, pemerintah dan masyarakat kulit putih Perancis (Wicaksono, 2017).

Berbeda dari kedua penelitian terdahulu tersebut, dalam artikel ini akan mencoba menyoroti bagaimana sejarah masuknya Islam di Eropa dan bagaimana peran yang dimainkan Islam dalam perpolitikan di Benua Eropa, khususnya di negara Perancis, Inggris, Jerman, dan Swedia. Dalam hal ini, komunitas Muslim berperan sebagai aktor utama yang terlibat dalam organisasi dan gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak umat Muslim serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah dan lembaga negara menjadi aktor penting dalam mempengaruhi kebijakan terkait integrasi dan hak minoritas sehingga kebijakan tersebut berdampak pada komunnitas Muslim. Partai politik dan organisasi masyarakat juga memainkan peranan penting dalam hal ini sebab keduanya dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada setiap konflik yang terjadi di keempat negara dengan populasi Muslimnya banyak dan tentunya berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, artikel ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana umat Islam dapat berperan aktif dalam perpolitikan di Eropa yang mayoritas masyarakatnya beragama non-Muslim.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial. Teori ini dipilih karena menawarkan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana identitas kelompok mempengaruhi perilaku dan partisipasi politik individu. Dalam konteks komunitas Muslim di Eropa, identitas sebagai Muslim bukan hanya sekedar label saja namun juga membentuk bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat mayoritas, serta bagaimana mereka melihat diri mereka dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Identitas sosial dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap diskriminasi, marginalisasi, dan pengakuan hak-hak seseorang. Dengan memahami identitas Muslim, peneliti dapat menjelaskan bagaimana komunitas Muslim menghadapi tantangan seperti Islamofobia. Selain itu, teori identitas sosial dapat membantu menjelaskan dinamika internal dalam komunitas Muslim seperti perbedaan pandangan dan strategi dalam memperjuangkan kepentingan politik. Dengan menggunakan teori identitas sosial, artikel ini mengungkap kompleksitas pengalaman politik komunitas Muslim dan bagaimana mereka beradaptasi dalam masyarakat multikultural Eropa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis buku, artikel jurnal, e-book, artikel prosiding konferensi dan lainnya yang relevan dengan politik Islam di Eropa. Metode ini akan memudahkan peneliti dalam menggali sejarah Islam di Eropa serta menganalisis peran Islam dalam konteks modern. Selain itu, peneliti menggunakan studi kasus untuk menggambarkan bagaimana peran Islam dalam perpolitikan di Eropa. Kasus yang diambil merupakan kasus yang terjadi di negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Swedia. Masing-masing kasus akan memberikan wawasan yang unik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh umat Muslim dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Masuknya Islam di Eropa

Masuknya agama Islam di Spanyol pada saat itu dipimpin oleh Raja Roderick. Misi utama di masa tersebut adalah menjadikan seluruh warga di wilayah Spanyol beragamakan Kristen dan meyakini trinitas (Faidi, 2021). Misi tersebutlah yang

menjadikan masyarakat Spanyol saling bermusuhan dan terpecah menjadi 5 kelompok yakni penguasa tanah yang menindas dan mengeksploitasi rakyat miskin, para buruh dan budak yang diperjual belikan, para aktor yang bergerak di bidang ekonomi yang disebut dengan golongan menengah, para penguasa, dan pihak gereja Katolik yang acuh terhadap masyarakat lainnya. Kondisi tersebutlah yang menjadikan agama Islam dapat dengan mudah masuk ke dalamnya tanpa ada perlawanan yang signifikan.

Takluknya Semenanjung Andalusia (sekarang Spanyol) sendiri terjadi pada abad ke 711 M pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik atau masa Dinasti Umayyah dan pemimpin dari perjuangan penaklukan Spanyol tersebut ialah Thariq bin Ziyad (Bakri, 2022). Namun sebelum Spanyol berhasil ditaklukkan, umat Islam telah lebih dulu menguasai Afrika Utara yang kemudian dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Dinasti Bani Umayyah. Masa penaklukan Afrika Utara tersebut dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan (tahun 30 H) hingga masa al-Walid (tahun 83 H), terhitung 53 tahun proses penaklukan Afrika Utara (Syalabi, 1983).

Kedatangan umat Islam di Andalusia pada 711 M merupakan suatu peristiwa yang sebelumnya telah diramalkan dan hal tersebut merupakan peristiwa yang ditakuti oleh orang-orang Latin sebab merupakan titik awal dari suatu zaman yang akan berlangsung selama 800 tahun kemudian. Awal mula datangnya umat Islam di Andalusia dikarenakan perintah dari raja Ghaitsyah atau Witiza yang merupakan sekutu dari Julian. Raja Witiza merupakan raja yang digulingkan begitu saja dalam sebuah revolusi yang dilakukan oleh pendukung Roderick yang masih kerabatnya (Zubaidah, 2016). Tak mau diam saja, para pengikut setia Raja Witiza beserta para putranya berjuang untuk merebut kembali kekuasaan dari Roderick. Sejak saat itu, gerakan separatis mulai bermunculan di pelosok negeri dan terus berlangsung hingga umat Muslim tiba di Andalusia.

Setelah Raja Witiza turun tahta, Achila atau Waqlah yang merupakan putra dari Raja Witiza pergi ke Afrika bersama dengan Count Julian dan menetap di sana. Count Julian merupakan penguasa Sabtah yang masih setia kepada Raja Witiza dan putranya. Di masa pemerintahan Roderick, kondisi negara semakin memburuk karena raja

membebani masyarakat dengan pajak yang besar dan tidak wajar. Di saat yang sama, Julian menjabat sebagai gubernur Tangiers dan Cueta berada di bawah naungan Raja Roderick. Julian menyekolahkan putrinya di Toledo yang merupakan istana Roderick dan ternyata Roderick jatuh cinta dengan putri Julian akan tetapi cintanya di tolak. Roderick marah karena cintanya ditolak sehingga ia memperkosa putri Julian (Nasution, 2013). Mendengar hal tersebut Julian marah dan pergi ke Qairawan untuk mendekati Musa ibn Nushair. Julian meminta bantuan umat Muslim untuk mengalahkan raja Roderick karena ia merupakan raja yang dzalim kepada rakyatnya. Akhirnya kondisi tersebut umat Muslim mau datang ke Andalusia. Dapat dikatakan bahwa penyerangan ke Andalusia bukan hanya karena suka perang semata namun karena ada keadilan yang harus ditegakkan di sana.

Pada masa penaklukan Spanyol, Tharif bin Malik, Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair merupakan pahlawan yang paling berjasa. Namun, nama Thariq bin Ziyad pada saat itu lebih terkenal dibandingkan kedua lainnya sebab pasukan yang dikirimnya lebih banyak sehingga hasilnya lebih nyata. Pasukan yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad tersebut semakin kuat karena didukung oleh Musa bin Nushair yang mengirimkan 7000 pasukan dari suku Barbar dan Khalifah al-Walid yang ikut mengirimkan pasukan orang arab (Hitti, 1970). Seluruh pasukan yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad tersebut menyebrangi selat dan mendarat di gunung Gibraltar (Jabal Thariq).

Thariq bin Ziyad bersama dengan pasukannya tersebut melangsungkan pertempuran di Bakkah dan berhasil mengalahkan Raja Roderick. Setelah itu kota-kota penting seperti Granada, Cordova dan Ibu kota kerajaan Goth atau yang saat ini dikenal sebagai kota Toledo berhasil ditaklukkan pasukan Thariq bin Ziyad. Kemenangan-kemenangan tersebut semakin membukakan jalan untuk penaklukan wilayah lainnya. Di samping itu, Musa bin Nushair mulai ikut melibatkan diri dan bergabung dalam perjuangan Thariq (Bakri, 2022). Setelah bergabungnya Musa bin Nushair dalam perjuangan Thariq, seluruh kota penting di Spanyol berhasil ditaklukkan tak terkecuali dibagian utara mulai dari Sragosa hingga Navarre. Selain itu, daerah Terrafona dan

Barcelona juga berhasil ditaklukkan. Kerjasama yang baik antara Musa dan Thoriq semakin memperluas daerah penaklukan dengan mudah.

Gelombang perluasan wilayah selanjutnya terjadi pada tahun 99 H/ 717 M yakni pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wilayah yang disasar yakni sekitar pegunungan Pyrenia dan Perancis Selatan. Perjuangan tersebut dipimpin langsung oleh as-Samah bin Malik al-Khaulani. Namun dalam perjuangan tersebut yakni di tahun 102 H atau 720 M as-Samah terbunuh sehingga menyebabkan kegagalan dalam penaklukan wilayah tersebut (Manan, 2020) Setelah terbunuhnya as-Samah, pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Kota pertama yang diserang oleh pasukan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi adalah kota Bordesu, lalu berlanjut ke kota Poiter dan Tours. Namun dalam usahanya menyerang kedua kota tersebut, Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi ditangkap dan ditahan oleh Charles Martel. Akibat dari penangkapan tersebut wilayah Perancis gagal ditaklukkan dan akhirnya tentara yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi mundur kembali ke Spanyol.

Tak sampai disitu saja, penyerangan demi penyerangan terus terjadi mulai dari Avirignon di tahun 734 M, hingga ke Lyon di tahun 743 M dan pulau-pulau yang ada di kawasan Laut Tengah. Selain itu, pada zaman Bani Umayyah Islam juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Majorca, Corsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus, dan sebagian wilayah Sicillia (Zubaidah, 2016). Keberhasilan Islam dalam penaklukan beberapa wilayah tersebut menjadikan Islam semakin kuat keberadaannya di Benua Eropa.

Gelombang kedua dalam usaha penyerbuan kaum Muslimin ke Eropa cukup besar hingga menjangkau wilayah Spanyol hingga Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari wilayah Italia. Selama lebih dari 7,5 abad Islam berjuang di tanah Spanyol. Mulai dari pertama kali Islam menginjakkan kaki di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam juga di Spanyol. Pada tahun 1608 M, Islam mulai hilang dari wilayah Spanyol karena pada saat itu umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yakni masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol.

Peran Islam dalam Perpolitikan di Eropa

Agama dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berkesinambungan, di mana dalam melakukan kegiatan politik untuk membangun negeri, agama berfungsi sebagai kontrol manusia. Keberadaan agama dalam suatu negara tentu sangat dibutuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ibn Khaldun berpendapat bahwa peranan agama sangatlah diperlukan dalam usaha menegakkan negara (Gunawan, 2017). Ia melihat bahwasannya agama berperan dalam menciptakan sebuah solidaritas dikalangan rakyat dan solidaritas yang terbangun tersebutlah yang dapat menjadikan tegaknya sebuah negara. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Mawardi yang menyatakan bahwa agama memberikan legitimasi moral bagi kepemimpinan politik, sehingga pemimpin yang berlandaskan agama cenderung lebih dipercaya rakyat dalam menjaga keadilan dan kebaikan bersama (Raihanna Aqilah M, 2024).

Di negara Eropa, meskipun sebagaian besar negara menganut prinsip sekularisme, namun pengaruh agama dalam politik tetap terlihat. Inggris menjadi salah satu negara yang menganggap bahwa tradisi keagamaan merupakan bagian dari struktur politik, dengan Gereja Inggris memiliki perwakilan dalam *House of Lords*. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa juga turut mempengaruhi perpolitikan melalui perjuangan hak-hak minoritas seperti kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi. Solidaritas umat Muslim di negara Swedia dan Jerman juga terlihat dalam bentuk organisasi politik dan sosial yang memperjuangkan hak-hak sipil sekaligus berkontribusi dalam stabilitas sosial.

Eropa sebagai benua dengan populasi pemeluk Islam terbanyak kedua setelah Kristen, menjadikan Islam memainkan peran penting dalam kancah perpolitikan khususnya dalam pemenuhan hak-hak dari seorang penduduk. Politik Islam sendiri merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Di Eropa sendiri terdapat beberapa negara dengan penduduk beragamakan Islam cukup banyak meskipun tidak sebanyak Kristen.

Di beberapa negara dengan penduduk Islam cukup banyak tersebut Islam memiliki peranan yang berbeda-beda dalam permasalahan yang berkenaan dengan politik.

Komunitas Muslim di Eropa memainkan peranan penting sebagai actor utama dalam organisasi dan gerakan sosial yang berjuang untuk hak-hak umat Muslim. Melalui berbagai inisiatif, komunitas Muslim tidak hanya berupaya meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi saja namun juga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan umat Muslim di Eropa. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga negara juga berperan krusial dalam menetapkan kebijakan terkait integrasi dan hak-hak minoritas. Selain itu, partai politik dan organisasi masyarakat sipil juga turut berkontribusi dalam proses ini. Keduanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik itu melalui pemilihan umum maupun dalam forum-forum diskusi publik. Adapun peran penting tersebut antara lain adalah;

1. ***Marcon dan Umat Islam di Perancis***

Perancis merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Di sebelah timur negara ini berbatasan langsung dengan Belgia, Jerman, Swiss dan Italia, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Perancis termasuk negara besar di Eropa setelah Rusia dan Ukraina, luas wilayahnya mencapai 543.965 km2 dengan total penduduk 65.097.000 Jiwa (Asari, 2019). Masyarakat Perancis menganut agama yang berbeda-beda yakni Katolik, Islam, Yahudi dan Budha. Beberapa diantaranya tidak beragama atau *ateis.*

Dibandingkan dengan negara lainnya seperti Inggris dan Jerman, Umat Muslim yang tinggal di Perancis jumlahnya cukup besar hingga mencapai lima juta jiwa. Di Perancis sendiri agama Islam merupakan agama terbesar ketiga setelah Katolik dan Yahudi. Populasi Muslim di Perancis mungkin memang sulit untuk dipastikan jumlahnya akan tetapi melihat perkembangannya yang semakin pesat, diperkirakan pada tahun 2040 mendatang agama Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Perancis mengalahkan Yahudi (Faridah, Syamsul, and Asriadi, 2021).

Islam mulai masuk Perancis di abad ke-8 tepatnya pada peralihan masa kekhalifahan Umayyah ke dinasti Abbasiyah (Putri and Imaduddin, 2021). Kaum Muslim di Perancis yang masih bertahan hingga saat ini bukanlah Muslim yang berasal dari kekhalifahan Andalusia sebelumnya, akan tetapi kebanyakan berasal dari imigran Aljazair Afrika Utara. Warga Muslim di Perancis mulai membangun jaringan antarumat Islam dan membangun masjid pada tahun 1970, hingga setelah itu mulai banyak pemuda Muslimnya mengenyam pendidikan tinggi di Perancis.

Di sisi lain, masalah politik yang ada di Aljazair sangat mempengaruhi pandangan dan tindakan warga Islam di Perancis. Sebagian besar jumlah Muslim di Perancis didominasi oleh warga imigran Muslim Aljazair (Wicaksono, 2017). Terlebih ketika partai FIS (*Front Islamique de Sault*) yang merupakan partai dari Aljazair mengalahkan partai penguasa sebelumnya. Kemenangan inilah yang mempengaruhi cara pandang politik dan keislaman warga Islam di Perancis. FIS (*Front Islamique de Sault*) sendiri merupakan partai yang didirikan oleh Aljazair pada tahun 1989, partai ini menjadi penampung aspirasi masyarakat kelas bawah dan *grassroot*. Kemunculan partai FIS ini memiliki pengaruh besar hingga ke Perancis.

Di saat Emmanuel Marcon berhasil memenangkan pemilu dan menjadi presiden Perancis tahun 2017, ia menunjukkan rasa simpati dan solidaritasnya yang tinggi terhadap warga pengungsi dan imigran. Marcon selalu berkomitmen untuk tetap berdampingan dengan Uni Eropa dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi praktik yang dapat mengancam kestabilan global. Dalam pemilu tersebut Marcon berhasil mengalahkan partai arus utama dan partai sayap kanan yang merupakan Islamofobia juga anti terhadap imigran (Nazara and Srifauzi, 2023). Marcon menjadi salah satu Presiden Perancis yang menolak dengan tegas terhadap tindak rasisme dan deskriminasi.

Bertepatan setelah berdirinya partai FIS tahun 1989, terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan yakni "kasus jilbab" di mana pada saat itu ada tiga pelajar sekolah menengah yang dikeluarkan karena memakai jilbab di kelas olahraga. Alasan dikeluarkannya tersebut karena dalam pelajaran olahraga dilarang menggunakan atribut

keagamaan apapun (Jamil and Setiadi, 2019). Hal ini tentu menjadi perhatian para warga Muslim hingga terjadilah protes besar-besaran. Masyarakat Muslim beranggapan bahwa kejadian kasus jilbab tersebut merupakan salah satu bentu deskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini partai FIS ikut serta dalam protes tersebut dan memberikan sedikit provokasi kepada warga Muslim. Kejadian tersebut membuat pemerintahan Perancis sedikit khawatir hingga polisi Perancis mengambil tindakan tegas terhadap FIS di Perancis. Selain daripada itu, FIS pernah mendapatkan tindakan represif dari polisi Perancis di tahun 1993. Hal tersebut dikarenakan manuver politik di kalangan warga Muslim dinilai dapat mengancam keamanan Perancis.

Pemerintah Perancis melakukan dialog dengan warga Muslim Perancis, yakni Pierre Joxe perwakilan dari pemerintah Perancis mengumpulkan tokoh-tokoh Muslim Perancis untuk mencari solusi. Hal ini dilakukan agar pengaruh FIS terhadap warga Muslim di Perancis tidak semakin membesar sehingga dapat menjadi boomerang bagi Perancis dan dapat mengancam keamanan Perancis. Dalam dialog tersebut dihasilkan sebuah lembaga bernama CORIF (*Discussion Group on Islamic de Paris*) (Darsh, 1980). Meskipun lembaga ini tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, namun CORIF dididirikan untuk nantinya dapat membantu pemerintah Perancis dalam mengendalikan, menengahi dan memecahkan permasalahan warga Muslim di Perancis (Kaunain, 2020). Anggota dari CORIF sendiri terdiri dari kalangan akademisi, pengusaha, pejabat pemerintah dan pemimpin agama Islam.

Dalam perjalanannya, CORIF mendapatkan tantangan yang cukup berat dari kalangan Islam sendiri hingga setelahnya muncul OUIF (*Union of Islamic Organization in France*) yang mana organisasi ini terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir (Amghar, 2006). OUIF menjadi salah satu organisasi yang memiliki pengaruh besar di Perancis. Hal ini disebabkan karena OUIF sangat professional dalam pengorganisasiannya, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kritis dalam berbagai kasus yang bersinggungan dengan warga Muslim, dan aktif dalam berdakwah di Perancis. Dapat disimpulkan bahwa usaha

pemerintah Perancis dalam bermediasi dengan warga Muslim tidak mendapatkan dampak yang positif, justru terjadi perpecahan antar warga Islam di Perancis itu sendiri yang mana dapat mengancam keamanan Perancis.

Dalam hal ini, FIS menggunakan pendekatan mobilisasi masa Muslim, terutama imigran Aljazair untuk memperjuangkan hak-hak minoritas seperti kebebasan beragama. Mereka memanfaatkan isu-isu diskriminasi seperti kasus larangan jilbab untuk membangun solidaritas dan meningkatkan kesadaran politik komunitas Muslim. Dengan retorika anti-diskriminasi FIS memperkuat identitas keagamaan umat Muslim sambil mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Meski selalu mendapatkan tindakan represif dari pemerintah Perancis, namun FIS tetap berupaya untuk mempertahankan pengaruhnya melalui dukungan terhadap pembentukan organisasi baru seperti OUIF yang aktif dalam kegiatan sosial dan advokasi masyarakat Muslim di Perancis (Meijer, 2013). Dapat dilihat bahwa pendekatan ini memperlihatkan bagaimana upaya FIS dalam memperkuat posisi politik umat Islam di tengah tantangan kebijakan sekularisme di Perancis.

Dalam disimpulkan bahwa Islam memainkan peran penting dalam pemenuhan hak sebagai penduduk. Seperti halnya dalam kasus jilbab tersebut di mana Islam sangat memperjuangkan kebebasan beragama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagaimana agama mayoritas lain yang diperbolehkan. Tentu keberadaan Islam di sini menjadi perhatian bagi pemerintah Perancis sebab manuver politik umat Islam dapat mengancam keamanan dari negara Perancis itu sendiri.

2. *Muslim dijajaran pengambil keputusan di Inggris*

Inggris merupakan salah satu negara yang terletak di bagian barat Eropa. Inggris berbatasan langsung dengan Irlandia di sebelah barat, di sisi lain Inggris dikelilingi oleh laut yakni Laut Irlandia, Laut Utara, dan Selat Inggris. Total luas wilayah inggris sendiri adalah 242.500 Km^2, sedangkan di tahun 2018 penduduknya sudah mencapai 66.436.000 Jiwa (Asari, 2019). Islam menempati posisi kedua agama terbesar setelah Kristen di Inggris. Pada awalnya, orang India yang berprofesi sebagai pelaut, tentara, dan

mahasiswa datang ke Inggris dan berhasil mendirikan komunitas Muslim pertama di Inggris (Nuraeni, 2020). Di tahun 1950, banyak warga Muslim dari Pakistan dan India yang bermigrasi ke Birmingham atau Bardford dengan alasan agar mendapatkan status hukum yang sama dengan penduduk pribumi Inggris dan setelahnya masjid-masjid mulai di bangun di Inggris. Pada tahun 1970, warga Muslim yang berimigrasi tersebut mulai diakui keberadaannya secara resmi dan mulai diikut sertakan dalam pemilihan umum (Kaunain, 2020). Tentu hal tersebut disebabkan karena partai politik di Inggris sedang berusaha mendapatkan dukungan suara etnis. Seiring berjalannya waktu warga Muslim menjadi lebih pro aktif dalam setiap kegiatan politik seperti sudah mulai membangun hubungan dengan pemerintah Inggris bahkan pemerintah Inggris ikut mendukung pembangunan masjid di Wales.

Di Inggris sendiri, warga Muslimnya terbagi ke dalam dua aliran besar yakni Doebandi dan Barelvi. Deobandi sendiri merupakan aliran yang memiliki paham pembelaan terhadap ortodoksi sunni dan pendalaman sufistik. Sedangkan aliran barelvi merupakan aliran yang sangat memuja Nabi Muhammad saw. Aliran barelvi hampir sama dengan aliran wahabi yang ada di Indonesia yakni aliran yang tidak menentang setiap penyimpangan dan ajaran-ajaran dari barat namun juga tidak menentang berbagai paham yang berbeda di setiap kalanga Muslim itu sendiri (Albert, 1998).

Umat Islam di Inggris memainkan peran yang aktif dalam setiap kegiatan politik, namun mereka cenderung bersikap anti terhadap partai-partai yang konservatif dan anti terhadap imigran. Dalam hal ini, Warga Muslim di Inggris lebih tertarik terhadap partai-partai yang memiliki perhatian kepada pekerja kulit putih dan masyarakat menengah ke bawah. Tentu hal ini dimanfaatkan oleh Partai Buruh untuk mendapatkan banyak dukungan dan suara di pemilihan umum. Pada pemilu tahun 2017 terdapat 15 anggota perlamen Muslim yang terpilih dan pada pemilu tahun 2019 jumlah anggota perlamen Muslim yang terpilih naik menjadi 19 (Wildan, 2019). Hingga pada akhirnya salah satu perwakilan Muslim di Inggris mendapatkan jabatan sebagai kepala Race Relation Unit dewan kota Birmingham (Kaunain, 2020). Tentu hal ini menjadi angin segar bagi warga

Muslim di Inggris, dengan begitu warga Muslim akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat akses ke pemerintah kota untuk mendapatkan hak-hak masyarakat minoritasnya.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Islam sangat penting di Inggris. Masyarakat Muslim di Inggris menggunakan pendekatan integrasi aktif dalam membangun pengaruh dan untuk memperoleh hak-hek mereka. Selain itu, komunitas Muslim di Inggris juga membangun kerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan fasilitas keagamaan dan memanfaatkan peluang politik dengan mencalonkan perwakilan Muslim di parlamen, Islam sendiri memegang peranan penting dalam berlangsungnya perpolitikan di Inggris sebab Imigran Islam telah diakui sebagai penduduk yang resmi dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum di Inggris. Tak hanya sebagai penyumbang suara dalam pemilihan umum saja, namun umat Islam di Inggris juga ikut berpartisipasi aktif dalam perpolitikan di Inggris. Umat Islam mulai mendekatkan diri kepada pemerintah agar hak-hak masyarakat minoritas dapat dipenuhi.

3. Organisasi Masyarakat Islam di Jerman

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa bagian Tengah yang berbatasan langsung dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis di bagian baratnya, berbatasan dengan Swiss dan Austria di bagian selatannya, berbatasan dengan Ceko dan Polandia di bagian timurnya dan berbatasan dengan Denmark di bagian utaranya. Jerman juga merupakan negara terluas ketujuh di Eropa dan ke-62 di dunia dengan luas total 357.104 Km^2 dan jumlah penduduk 84.156.000 Jiwa (Asari, 2019).

Jerman merupakan sebuah republik parlementer federal yang demokratis. Kekuatan legislatif federalnya sendiri diurus dalam Bundestag atau perlamen dan Bundesrat atau badan perwakilan negara-negara bagian regional di Jerman. Populasi Muslim di Jerman termasuk banyak yakni lebih dari 4 juta jiwa atau 5% dari total keseluruhan penduduk Jerman. Agama Islam di Jerman menduduki posisi agama terbesar ketiga setelah Protestan dan Katolik (Zahrotunnimah, 2019).

Meskipun jumlah penduduk Jerman yang beragamakan Islam masih minoritas kecil yakni sekitar 4,3%, namun di daerah perkotaan Islam berkembang dengan pesat dan menuntut pengakuan politik. Disaat simbol-simbol Kristen semakin menghilang dalam pandangan publik, jumlah anggota di gereja mengalami penurunan dan penegakan norma-norma gereja sangat dibatasi, Islam justru secara eksplisit menekankan religiusitas mereka (Schröter, 2023). Mereka menunjukkan identitas keislaman mereka melalui pakaiannya dan simbol-simbol Islam. selain itu, mereka juga menuntut penerapan norma-norma Islam mislanya di sekolah. Namun di sisi lain, sebagian dari mereka ada yang tidak sependapat dengan hal tersebut dan mendesak agar tidak memperkuat organisasi Islam.

Politik Islam secara resmi mulai ada di Jerman pada tahun 2007 yakni dalam Konferensi Islam Jerman yang diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri, Wolfgeng Schauble pada tahun 2006 (Naf'an and Yumitro, 2022). Konferensi tersebut merupakan forum dialog politik yang paling berpengaruh dalam komunitas Muslim di tingkat nasional. Hasil dari konferensi Islam Jerman tersebut ialah rekomendasi pendirian pusat studi Islam dan ketua teologi Islam di Universitas-universitas yang ada di Jerman. Kelompok Islam yang hadir dalam konferensi tersebut ialah umat Islam dari golongan Salafi, tradisionalis, Islamis hukum, anggota kelompok sufi yang beragam, umat Islam liberal dan warga Muslim.

Sebagian besar kalangan aktor politik di Jerman beranggapan bahwa para golongan salafisme merupakan ekstrimisme tidak seperti aktor-aktor yang berasal dari poltik Islam resmi seperti Ikhwanul Muslimin. Di Jerman sendiri politik Islam resmi diorganisir menjadi empat organisasi yang melindungi setiap anggotanya. Empat organisasi tersebut adalah DITIB (*Diyanet Isleri Turk-Islam Birligi*), Milli Gorus, VIKZ (*Veband der Islamischen Kulturzentren*), dan ZMD (*Zentralrat der Muslime in Deutschland*) (Wildan, 2019). Organisasi-organisasi yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin mulai memperluas jaringannya secara internasional maupun di Jerman itu sendiri. Salah satunya adalah Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa yang secara teologis menolak norma-

norma sekuler dan mendukung masyarakat tandingan Muslim. Organisasi Ikhwanul Muslimin di Jerman sendiri mulai mencangkup masjid-masjid yang dekat dengan Salafisme dan melakukan retorika salafi melalui khotbah jum'at.

Di antara organisasi-organisasi besar tersebut terdapat satu organisasi kecil yang tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat Sunni. Organisasi tersebut adalah Jamaah Muslim Ahmadiyah. Meskipun tidak diterima oleh kalangan Sunni namun organisasi kecil ini memainkan peran yang penting sebagai mitra kerjasama negara. Jama'ah Muslim Ahmadiyah merupakan satu-satunya organisasi Muslim yang diakui oleh negara Jerman sebagai organisasi keagamaan penuh (Schröter, 2023). Namun di sisi lain, organisasi ini menyebarkan segresi gender yang kaku, subordinasi perempuan dan menganggap kekhalifahan adalah satu-satunya tatanan Islam yang sejati.

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi Islam politik tersebut telah melakukan banyak upaya untuk menerapkan norma-norma Islam di Jerman. Akibat dari hal tersebut mulai banyak orang tua Muslim yang melarang anaknya untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti renang, olarharaga dan wisata sekolah. Anak perempuan juga mulai tidak mau duduk disebelah laki-laki dan anak perempuan mulai mengenakan jilbab. Tidak hanya sampai disitu, penindasan terhadap non-Muslim juga semakin banyak diantaranya penghinaan sebagai kafir, daging babi tidak boleh lagi disediakan di kantin.

Perkembangan ini mengarah pada konflik permanen dan mulai melemahkan prinsip netralitas negara. Perempuan berjilbab yang menjadi pengurus Asosiasi Muslim seringkali meminta hak mereka untuk menjalankan tugas perwakilan pemerintah. Keikutsertaan perempuan bercadar dalam seminar-seminar di universitas juga semakin meningkat. Setiap kali penegakan norma-norma Islam yang ditargetkan menemui perlawanan, maka perwakilan Islam politik tersebut akan berusaha membungkam lawan-lawannya dengan tuduhan Islamofobia atau rasisme anti-Muslim.

4. Hak Asasi Manusia di Swedia

Swedia merupakan salah satu negara yang terletak di bagian Eropa Utara yang berbatasan langsung dengan Norwegia di barat, Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak

dan Selat Kattegat di barat daya, serta laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur. negara Swedia merupakan negara terluas ketiga di Eropa dengan total luas wilayahnya mencapai 450.295 Km^2 dan total penduduknya 10.550.054 jiwa (Statistics Sweden, 2021). Islam di Swedia sendiri merupakan agama dengan pengikut terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Jumlah penduduk yang beragamakan Islam mencapai 30 % atau kurang lebih 4,5 juta jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Swedia (Syauqii, 2023). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga 31 % dimasa yang akan datang karena tingkat imigran Muslim di Swedia terus meningkat. Selain itu, keberadaan komunitas Muslim yang diberikan kemudahan dalam memperkenalkan simbol-simbol keagamaan Islam juga menjadi salah satu penyebab umat Islam meningkat di Swedia.

Melihat banyaknya Muslim di Swedia tentu membuat keberadaannya memiliki pengaruh besar. Organisasi Muslim pertama di Swedia juga telah terbentuk dengan nama *Turk-Islam Foreningen I Sverige for Religion ich Kultur* (Asosiasi Turki-Islam di Swedia). Organisasi ini didirikan oleh beberapa orang yakni Ebrahim Umerkajeff, Ali Zakerov, Osman Soukkan dan beberapa orang yang berasal dari Tatar dan Turki (Sorgenfrei, 2020). Tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini mengenai isu-isu yang menyangkut kelompok Muslim dan kepentingan umat Muslim di Swedia, meningkatkan partisipasi, pengaruh dan representasi Muslim di lembaga-lembaga atau badan-badan publik di Swedia. Dapat dikatakan bahwa IFIS merupakan organisasi yang digunakan sebagai penyambung inspirasi dari Muslim ke pemerintah Swedia.

Di sisi lain, melihat jumlah pemeluk Islam di Swedia semakin besar membuat politisi anti-Islam seperti Paludan merasa resah dan tentunya mereka tidak ingin Islam semakin berkembang di Swedia. Tak heran jika Paludan melakukan aksi provokatif dan politik adu domba untuk melemahan umat Muslim di Swedia dengan memanfaatkan aturan kebebasan berpendapat. Seperti halnya dalam kasus pembakaran al-Qur'an yang terjadi di Swedia, disini Paludan berusaha untuk memprovokasi umat Islam untuk melakukan unjuk rasa yang berakhir ricuh (Syauqii, 2023). Hal tersebut benar terjadi hingga

membuat Perdana Menteri hausarbeit schreiben Lassen Swedia mengecam umat Islam karena melakukan unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan dan kericuhan.

Aksi yang dilakukan oleh Ramus Paludan dan partai politik Stram Kurs tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengumpulkan para anti-Islam dan anti-imigran. Tentu cara yang digunakan dalam usaha tersebut adalah dengan meenggunakan politik *devide et impere* atau politik adu domba untuk melumpuhkan kelompok Muslim hingga terjadi perselisihan baik sesame Muslim ataupun Muslim dengan pemerintah (KOMAHI, 2022). Tujuan akhir dari dilakukannya politik adu domba tersebut semata-mata agar Muslim di Swedia tidak semakin berkembang dan menguasai Swedia. Hal ini tentu menjadi tantangan yang cukup besar bagi kaum Muslim di Swedia untuk tetap berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang anti-Islam seperti Paludan yang tidak menginginkan keberadaan Islam di Swedia.

Respon yang ditunjukkan komunitas Muslim terhadap pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ramus Paludan mencerminkan berbagai reaksi yang beragam. Banyak negara Muslim seperti Turki, Indonesia, dan Malaysia secara resmi mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi dan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Protes public muncul di berbagai lokasi menunjukkan kemarahan dan solidaritas di kalangan umat Muslim di seluruh dunia. Kejadian ini juga meningkatkan perhatian terhadap isu Islamofobia dan diskriminasi dengan tuntutan agar pemerintah negara-negara Barat lebih responsif terhadap tindakan yang merugikan umat Muslim. Beberapa politisi Muslim beserta umat Muslim mendesak tindakan hukum terhadap Paludan dan pihak lain yang mendukungnya, menuntut agar pemerintah Swedia mengambil langkah untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan yang akan datang (Hakim & Hanafi, 2023). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa komunitas Muslim di Swedia mengambil berbagai langkah strategis untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dengan mendirikan organisasi seperti *Turk-Islam Foreningen I Sverige for Relegion ich Kultur* yang berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umat

Muslim di lembaga-lembaga publik (Sorgenfrei, 2020). Selain itu, komunitas ini juga aktif dalam mengadvokasi hak-hak minoritas seperti kebebasan beragama dan penggunaan symbol keagamaan dengan mengadakan dialog bersama pemerintah guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa di Inggris, umat Islam telah berhasil membagun identitas yang kuat dan terorganisir melalui partisipasi politik yang aktif. Umat Muslim di Inggris tidak hanya berjuang untuk hak-hak minoritas saja namun juga berusaha mendapatkan pengakuan dalam sistem politik dengan cara membentuk jaringan dan organisasi yang mewakili kepentingan umat Muslim. Keberadaan anggota perlamen Muslim yang terpilih di Inggris menunjukkan bahwa komunitas Muslim mampu mempengaruhi kebijakan dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, menciptakan ruang bagi dialog dan integrasi.

Di Perancis, tantangan yang dihadapi umat Muslim jauh lebih kompleks terutama terkait dengan sekularisme yang ketat dan meningkatkan Islamofobia. Dalam konteks ini, gerakan Islam di Perancis berfokus pada perjuangan untuk hak-hak sipil dan kebebasan beragama. Kasus jilbab menjadi salah satu pemicu protes besar-besaran menjadi contoh nyata bagaimana komunitas Muslim berjuang melawan diskriminasi, menuntut pengakuan dan legitimasi dalam ruang publik. Melalui aksi protes dan advokasi, umat Islam berusaha untuk mengubah persepsi negatif yang sering melekat pada mereka.

Di Jerman, dengan meningkatnya populasi Muslim akibat gelombang imigrasi, gerakan Islam mulai mendapatkan perhatian lebih dalam dunia politik. Umat Islam di Jerman berusaha untuk membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah dan masyarakat, berfokus pada dialog yang lebih baik dan penciptaan kebijakan yang inklusif. Komunitas Muslim di Jerman mengorganisasi diri untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu, di Swedia meskipun populasi Muslim tergolong kecil, gerakan Islam menunjukkan potensi untuk menjadi suara yang

signifikan dalam politik. Dengan pendekatan inklusif dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat, umat Islam di Swedia berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan politik serta membangun jembatan dengan komunitas lainnya. Kolaborasi ini akan sangat penting untuk memperjuangkan kepentengan mereka yang mencerminkan nilai-nilai pluralisme yang dianut oleh masyarakat Swedia.

Secara keseluruhan, meskipun setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda namun terdapat kesamaan dalam upaya komunitas Muslim dalam membangun identitas kolektif dan memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui mobilisasi sosial dan partisipasi politik, umat Islam di Eropa berupaya mengatasi marginalisasi dan memperjuangkan keadilan sosial. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik, serta menunjukkan bagaimana gerakan Islam dapat menjadi kekuatan yang relevan dalam masyarakat yang semakin beragam.

Kesimpulan

Islam memainkan peran penting dalam dunia perpolitikan di Eropa meskipun keberadaanya tergolong minoritas. Di Perancis Islam hadir sebagai garda terdepan dalam usaha memperoleh hak-hak sebagai penduduk minoritas seperti dalam kasus jilbab dimana Islam sangat memperjuangkan kebebasan beragama. Sama halnya di Inggris, Islam juga memainkan peran penting dalam proses perpolitikan di negara tersebut. Keberadaan Islam yang sudah diakui keresmiannya sebagai penduduk Inggris tentu suaranya sangat dipertimbangkan, peran Islam juga merambah dalam setiap kegiatan politik di Inggris terbukti adanya perwakilan Islam yang menjadi kepala *Race Relation Unit* dewan kota Birmingham. Di Jerman Islam juga sangat berperan penting dalam dunia politik di mana organisasi-organisasi Islam di Jerman mulai menjalin kerjasama dengan pemerintahan. Tentu dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Islam dan pemerintah maka hak-hak sebagai penduduk minoritas dapat lebih diperhatikan. Seperti halnya keempat negara di atas, penduduk Islam yang tergolong minoritas di Swedia juga tetap memiliki perannya penting dalam jalannya pemerintahan Swedia. Terlebih adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Paludan dan kelompok

anti-Islam, ini menjadi tantangan bagi umat Islam untuk tidak terprovokasi akan hal tersebut. Secara keseluruhan, komunitas Muslim di Eropa berjuang untuk membangun solidaritas kolektif, mengatasi marginalisasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Dinamika ini menunjukkan bahwa gerakan Islam dapat menjadi kekuatan yang sangat penting dalam masyarakat yang semakin beragam.

Referensi

Albert, H. (1998). *Islam dalam Pandangan Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aliyudin, A. (2015). Sketsa Dakwah Islam di Eropa Barat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *4*(11), 1. https://doi.org/10.15575/jid.v4i11.382

Amghar, S. (2006). *Islamismes d'Occident Etat Des Lieux et Perspectives*. Franch: Lignes of Reperes.

Asari, H. (2019). *Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negoisasi Historis Sejak Abad XIX*. Medan: Perdana Publishing.

Bakri, S. (2022). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Sukoharjo: Efudepress.

Budiyono. (2015). Hubungan negara dan Agama dalam negara Pancasila. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305

Darsh, S. (1980). *Muslim in Europe*. London: Ta-Ha Publisher.

Faidi, A. (2021). Kekuasaan Politik Islam di Andalusia: Pintu Gerbang Menuju Renaisance Eropa. *AL-IJTIMA`I - International Journal of Government and Social Science*, *6*(2), 127–138.

Faridah, F., Syamsul, H., & Asriadi, A. (2021). Analisis Perkembangan Islam Di Perancis. *RETORIKA Jurnal Kajian Komunikasi & Penyiaran Islam*, *3*(1), 28–43.

Gunawan, E. (2017). Relasi Agama dan negara: Perspektif Pemikiran Islam. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, *11*(2), 105–125.

Hakim, L., & Hanafi, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Pembakaran Al-Qur'an di Media Online. *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, *1*(2), 1–12. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15642/jicos.2023.1.2.1-12

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs*. London: Macmillan Press.

Jamil, I., & Setiadi, O. (2019). Politik identitas Muslim di Jerman dan Perancis. *POLITEA*, *2*(2), 135. https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5699

Kaunain, M. F. (2020). Islam Politik di Eropa: Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam di Inggris dan Prancis Abad 20. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1287

KOMAHI. (2022, April 23). *Strategi Politik Devide et Impera di Balik Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia*. https://komahi.uai.ac.id/strategi-politik-devide-et-impera-di-balik-aksi-pembakaran-al-quran-di-swedia/

Manan, N. A. (2020). Kemajuan dan Kemunduran Peradaban Islam di Eropa (711M-1492M). *Jurnal Adabiya*, *21*(1), 54. https://doi.org/10.22373/adabiya.v21i1.6454

Meijer, R. (2013). The Muslim Brotherhood and the Political: An Exercise in Ambiguity. Dalam E. Bakker & R. Meijer (Ed.), *The Muslim Brotherhood in Europe* (hlm. 294–320). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199327638.003.0014

Naf'an, S. M., & Yumitro, G. (2022). Strategi Alevi Sebagai Kelompok Kepentingan Pasca Penolakan Masyarakat Turki. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, *8*(3), 807–823. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2432

Nasution, S. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.

Nazara, A. M., & Srifauzi, A. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis – Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emanuel Marcon. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial*, *5*(1).

Nuraeni. (2020). Perkembangan Islam di Inggris. *Al-Hikmah*, *22*(2), 10–30.

Pew Research Center. (t.t.). *The Future of the global Muslim Population- Europe (Excluding However Turkey and Including Siberian Russia)*. Diambil 21 Maret 2023, dari https://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-Muslim-population-regional-europe/

Putri, M. S., & Imaduddin, F. (2021). Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis). *Journal of Comparative Study of Religions*, *2*(1). https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668

Raihanna Aqilah M, N. (2024). Pemikiran Al-Mawardi; Kritik Terhadap Konsep Politik Nicollo Machiavelli. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*(6), 758–767. https://doi.org/10.5281/ZENODO.12680344

Ritonga, P. I., Hafiz, M., & Dahlan, Z. (2024). Sejarah Islam Kontemporer di Dunia Barat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(1), 163–169. https://doi.org/Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.219

Schröter, S. (2023). Islam, Politics, and Society in Germany. Dalam H. J. Selderhuis (Ed.), *The Power of Religion / Religion and Power* (hlm. 41–52). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111229102-004

Sorgenfrei, S. (2020). Establishing Islam in Sweden: The First Tatar Community and Muslim Congregation and Their Sources. *Studia Orientalia Electronica*, *8*(2), 82–95. https://doi.org/10.23993/store.83006

Statistics Sweden. (2021). *Population Statistics*. https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/

Suwito. (2005). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Syalabi, A. (1983). *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jilid 2). Jakarta: Pustaka Alhusna.

Syauqii, F. (2023). Islamofobia dan Turkofobia di Eropa: Studi Kasus Pembakaran Al-Quran Oleh Rasmus Paludan. *Islam & Contemporary Issues*, *3*(2), 65–69. https://doi.org/10.57251/ici.v3i2.1127

Uddin, B., Sapto, A., Ningrum, E., Diniari, R., Wilantari, N., Ratnawati, N., Saraswati, R., & Sujito, A. (2018). *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Usri & Hamzah S Fathani. (2022). Pembaharuan Sistem Pemerintahan Pada Dinasti Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Islam. *AL-MUTSLA*, *4*(1), 67–76. https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.265

Wicaksono, M. A. (2017). Dinamika Imigran Muslim Perancis.pdf. *Jurnal Transformasi Global*, *4*(2). https://doi.org/10.21776/jtg.v4i2.79

Wildan, M. (2019). Perkembangan Islam di Tengah Fenomena Islamofobia di Jerman. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, *2*(2), 244–271. https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4694

Zahrotunnimah, Z. (2019). Kebebasan Beragama Bagi kaum Muslimin di Negeri Jerman. *'ADALAH*, *3*(1). https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10947

Zubaidah, S. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Perdana Publishing.